

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah dituntut agar dapat melakukan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas untuk membangun negara atau daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Salah satu sumber daya yang terpenting yang harus dikelola dengan baik adalah keuangan. Seiring dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka pengelolaan keuangan daerah seutuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. (Suryana,2018)

Menurut Baturante, dkk (2018) laporan keuangan merupakan media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memuat informasi akuntansi yang berkualitas agar dapat digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Agar terwujudnya informasi akuntansi yang berkualitas, terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah yang diperlukan . Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 laporan

keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Penerapan sistem akuntansi yang baik tentunya secara konsep dapat berperan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas yang di tandai dengan minimal kesalahan pencatatan, kecurangan, ketidak patuhan terhadap hukum dan pada akhirnya di wujudkan dengan opini dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Mardi (2014) pengertian dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian dari prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purbalingga tahun 2019 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perolehan ini tercatat empat kali berturut-turut, sejak 2016 sampai 2019. Penghargaan itu tentunya akan semakin memacu semangat seluruh jajaran Pemkab Purbalingga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemda yang mendapat opini WTP terdiri dari 34 pemerintah provinsi, 87 pemerintah kota dan 365 pemerintah kabupaten. Dibandingkan dengan 2018, keberhasilan pemda yang mendapat opini WTP atas LKPD meningkat 7,9 persen. (<https://jatengprov.go.id>)

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik juga dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern (SPI). Menurut Mutiana, dkk

(2017) sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai tentang atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan dukungan sistem pengendalian intern yang kuat tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah jugaditentukan oleh seberapa baik pengendalian internalnya. Jika pengendalian internal lemah, maka akan sulit mendeteksi kecurangan proses akuntansisehingga dapat menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi tersebut menjadi tidak relevan.

Menurut Patra,dkk (2015) penerapan sistem akuntansi yang baik tentunya secara konsep dapat berperan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas yang di tandai dengan variabel adanya atau minimal kesalahan pencatatan, kecurangan, ketidak patuhan terhadap hukum dan pada akhirnya di wujudkan dengan opini dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta memenuhi kreteria kualitas relevan, andal, dapat dipercaya dan di bandingkan. Seperti yang kita ketahui proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau existensi suatu organisasi dalam suatu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal

tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas.

Dalam suatu pemerintahan, tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten guna memperoleh laporan keuangan pemerintahan yang berkualitas. Adelina dan Hariyanto (2017) yang menyatakan bahwa penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan SDM yang memiliki kompetensi serta menguasai akuntansi pemerintahan. Kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dalam bidang karir tertentu yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tugas atau fungsi sesuai dengan keahliannya.

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Patra, dkk (2015) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Adelina dan Heriyanto (2017) juga menunjukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini bertentangan dengan Kartopawiro dan Yohanes (2018) mencerminkan tidak berpengaruh positif antara system akuntansi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terhadap Kualitas pelaporan Kuangan daerah. Yunita (2019) menunjukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutiana, dkk (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Satker. Tawaqal dan Suparno (2017) juga menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Baturante, dkk (2018) menyatakan penerapan SPI tidak berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Desipradani dan Nuraini (2018) menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Megawati, dkk (2015) menunjukkan dimana variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tawaqal dan Suparno (2017) juga menunjukkan hasil dimana kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Banda Aceh. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andelina dan Hariyanto (2017) yang menunjukkan bahwa hipotesis Kompetensi SDM berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Demak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Indah Mutia Anugerah (2016). Populasi dalam penelitian tersebut adalah seluruh SKPD pemerintah kota Bandung yaitu 17 SKPD, dengan jumlah sampel 34 responden. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan

seluruh SKPD pemerintah kota Purbalingga yaitu 27 SKPD, dengan jumlah sampel 58 responden.

Perbedaan lainnya dengan penelitian ini adalah adanya penambahan variabel independen yaitu sistem pengendalian internal. Laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI) seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004 yang menyatakan kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Peran SPI adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?

4. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan ?
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan ?
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan ?
4. Untuk mengetahui secara bersama – sama pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat sehingga memberikan dampak tercapainya suatu penelitian. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

## 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya:

- a. Bagi penulis, kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan penulis tentang penerapan sistem akuntansi keuangan, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan.
- b. Bagi pihak-pihak lain (peneliti selanjutnya), dapat digunakan sebagaibahan referensi atau kajian untuk pengembangan penelitian selanjutnyaterutama yang berkaitan dengan kualitas Laporan Keuangan.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya:

- a. Bagi Pemerintah Daerah, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan menjadi tolok ukur pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Bagi pengelola keuangan, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan agar para pegawai dapat lebih termotivasi untuk dapat mempelajari tentang akuntansi pemerintahan dan banyak mengikuti pelatihan akuntansi untuk meningkatkan kompetensi tentang pelaporan keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

c. Bagi penulis, penelitian ini memberikan bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama di bangku kuliah dalam karya nyata.

